



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.2.2.70-81

**EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PROGRAM PKKPM-P2B
(PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PENGEMBANGAN
PENGHIDUPAN BERLANJUT)
(Studi Kasus Program PKKPM-P2B Desa Rena Panjang
Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma)**

***THE EVALUATION OF POST-IMPLEMENTATION OF PKKPM-P2B PROGRAM
(Case study on Post-Implementation of PKKPM-P2B Program
in Rena Panjang Village)***

Wayan Eka Saputra¹, Sulistya Wardaya², Asep Topan³
mengdawati@gmail.com

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk:(1). Menganalisa dan mengidentifikasi tahapan program PKKPM-P2B di Desa Rena Panjang. (2). Menganalisa dan mendeskripsikan hal-hal terkaitnya macetnya program PKKPM-P2B di Desa Rena Panjang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Snowball Sampling*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, pengujian, pemilihan, kategorisasi, sampai pada penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya orientasi anggota masyarakat dan anggota kelompok penghidupan berlanjut terhadap dana bantuan program, perlawanan sehari-hari pasca pelaksanaan program PKKPM dan efek liar yakni melemahnya struktur sosial dan pengelompokan semu masyarakat. Rekomendasi dari hasil penelitian yakni: (1). Orientasi masyarakat terhadap program pembangunan (2). pemaknaan masyarakat terhadap program pembangunan berkaitan dengan keberlanjutan program pembangunan, (3). perlawanan sehari-hari masyarakat pada tahapan kegiatan pembangunan.

Kata Kunci : *Evaluasi PKKPM, Orientasi Program PKKPM, Perlawanan Pasca Pelaksanaan Program PKKPM. Efek Liar PKKPM.*

Abstract

The study is intended to: (1) analyze and identify the stage of PKKPM-P2B in Rena Panjang village. (2) analyze and describe the integrated problem of PKKPM-P2B program in Rena Panjang village. The selection of informant is done by using Snowball

Sampling technique. Data collection uses interview and observation technique. The analysis is done by reducing data, testing, selecting, classifying, and drawing the conclusion to answer the research problem. The result of research indicates that there is orientation of society member toward the program and the resistance to the post-implementation of PKKPM program. The fact indicates orientation of toward the program, the daily resistance is from the acceptance of aid program and general society, and uncontrolled effect of weakening the social structure and the classification of apparent society. The recommendation of the research is: (1) society orientation to the development program (2) society purpose to the development program which is integrated with the continuous development program, (3) daily resistance of the society toward the stage of development activity.

Keywords : *Evaluation of PKKPM, Orientation of PKKPM Program, Resistance of Post-Implementation of PKKPM Program, Uncontrolled Effect of PKKPM.*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu cara peningkatan ekonomi masyarakat. Pendekatan pembangunan yang digunakan yakni *bottom up* dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) merupakan program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (PDDT). Program PKPM merupakan program yang dilaksanakan atas dasar kriteria kemiskinan yang ada di suatu daerah dengan mengacu pada Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW). Data IKW mengacu pada keadaan miskin suatu wilayah yang terdiri dari kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non-konsumsi, kemiskinan pelayanan dan kemiskinan infrastruktur. Dari hasil pelaksanaan kegiatan PKKPM dijumpai bentuk bantuan fisik dan non fisik terkhusus di Desa Rena Panjang (Kementrian Desa dan PDTT.2015. 9).

Penentuan penerima bantuan program terdiri dari pemilihan lokasi kecamatan yang ditentukan berdasarkan IKW yang diberlakukan untuk pemilihan desa penerima bantuan. Ditingkat desa, penentuan penerima bantuan program ditentukan berdasarkan data PPLS 2011. Penerima bantuan program tingkat desa ditentukan dengan mengadakan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa menghasilkan kriteria penerima bantuan program. musyawarah antar desa karena data PPLS 2011 yang digunakan menunjukkan data yang tidak bisa digunakan sebagai acuan karena data yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) program PKKPM, tahapan-tahapan program terdiri sosialisasi program, perencanaan program,

pelaksanaan dan serah terima program. tujuan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan dana yang bersifat dana bergulir kepada anggota masyarakat penerima bantuan program dan bantuan fisik penunjang ekonomi.

Laporan kegiatan PKPM menunjukkan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan program dilaksanakan sesuai dengan aturan JUKNIS program PKKPM. Tahapan-tahapan program dilaksanakan berdasarkan aturan JUKNIS Program. Sosialisasi dilaksanakan pada musyawarah antar desa, musyawarah di tingkat desa dan musyawarah di tingkat dusun. Musyawarah digunakan untuk menentukan alokasi dana program, pemilihan pengurus Unit Pelaksana Kegiatan, Pemilihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun menurut hasil penelitian SMERU Research Institute menjelaskan bahwa program PKKPM-P2B tidak berjalan sesuai dengan JUKNIS dan menjadi penyebab tidak berjalannya program sesuai dengan rencana. Namun, menurut peneliti kegagalan program PKKPM tidak bisa diukur dari pelaksanaan JUKNIS program. Pendekatan kultural bisa digunakan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan program pembangunan di desa. Atas dasar hipotesa tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikan pasca pelaksanaan program PKKPM di Desa Rena Panjang menggunakan pendekatan Sosiologi.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan bagaimana pelaksanaan kegiatan Program PKKPM-P2B, tindakan anggota KPB terhadap bantuan Program PKKPM-P2B dan faktor penyebab tindakan KPB terhadap Program PKKPM-P2B pasca pelaksanaan kegiatan program di Desa Rena Panjang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan mengidentifikasi tahapan Program PKKPM-P2B serta menganalisa dan mendeskripsikan hal-hal terkaitnya macetnya Program PKKPM-P2B di Desa Rena Panjang. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dengan paradigma definisi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan dilakukan di Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan laporan kegiatan yang dikerjakan yakni peternakan dan dibangunnya infrastruktur penunjang ekonomi berupa kandang sapi

yang mencerminkan kegiatan program dilaksanakan secara berkelompok. Data dan informasi yang dikumpulkan dari sejumlah informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Sumber data diperoleh secara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara. Pada penelitian tentang Evaluasi Program PKKPM-P2B Pasca pelaksanaan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain. Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang hal yang tercakup di suatu fokus/pokok permasalahan yang sedang diteliti. Penggunaan analisis domain bertujuan agar peneliti memperoleh gambaran umum tentang fenomena yang akan diteliti agar memperoleh gambaran tentang tindakan objek penelitian terhadap program.

PEMBAHASAN

a. Orientasi Terhadap Program PKKPM

Teori tindakan sosial Max Weber (dalam Bachdim Wardi. 2006) mengenai tindakan sosial rasionalitas instrumental (*zwekrationality*) menjelaskan bahwa tindakan sosial yang menyandarkan diri pada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai menurut Weber tidak kaku karena bisa saja tujuan tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan lain.

Manusia bertindak karena mempertimbangkan kegunaan ekonomis suatu kegiatan yang nantinya mampu digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian dilaksanakan pasca pelaksanaan program namun atmosfer ingin menjadi anggota KPB baik anggota masyarakat desa, Aparatur Desa dan Stakeholder program di tingkat desa sangat terasa ketika wawancara dilakukan. Anggota masyarakat yang pernah terlibat dan mengetahui tentang kegiatan walaupun hanya pada aspek mendapatkan dana bantuan, membuat setiap pembicaraan tentang program PKKPM membuat anggota masyarakat merasa sebagai orang yang pantas menerima bantuan program. Subjektivitas oleh anggota masyarakat yang menjadi anggota KPB serta aparat desa dan anggota masyarakat yang menempati struktur organisasi program PKKPM tentang kriteria miskin menjadi pembicaraan yang menarik. Tidak dipungkiri bahwa setiap pembicaraan mengenai program, maka akan selalu mengarah kepada

“seharusnya yang menerima bantuan saya” yang dibungkus dengan keadaan yang digambarkan sedemikian rupa.

Keinginan menjadi anggota KPB di dalam struktur program PKKPM langsung terlihat ketika Istri Bapak YH yang merupakan KPMD desa Rena Panjang menjadi salah satu anggota KPB. Pada juknis Program PKKPM-P2B, kegiatan berkelompok dikerjakan di satu dusun telah dilaksanakan. Kegiatan berkelompok terpusat di Dusun II dengan empat kelompok. Namun pada prakteknya, penentuan seorang anggota KPB memiliki hubungan erat antara kepengurusan program dan keluarga atau teman dekat. pengikutsertaan keluarga yakni orang tua, istri, anak dilaksanakan tanpa adanya protes dari dalam walaupun diluar (masyarakat yang tidak menerima bantuan program) terdengar samar-samar tentang penerima bantuan program. Orang tua dan istri informan YH tercatat sebagai anggota KPB penerima bantuan sapi. Mengikutsertakan keluarga bukan satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan struktur program PKKPM.

Pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan yakni “hibah”. Pembentukan pemahaman bersama diketahui pada wawancara yang dilakukan pada penelitian dan nihilnya pembayaran angsuran program seluruh anggota KPB desa Rena Panjang. Keterlibatan pada struktur organisasi pada pelaksanaan program PKKPM merupakan cara digunakan untuk menempatkan anggota keluarga sebagai penerima bantuan program PKKPM. Sedikit rumit rasanya untuk tidak menyetujui keadaan yang telah dijelaskan karena berdasarkan keadaan lapangan, anggota keluarga ketua TPK Desa Rena Panjang merupakan salah satu penerima bantuan program PKKPM. Secara administratif, orang tua ketua TPK merupakan penerima bantuan program, namun pada prakteknya ketua TPK merupakan pelaksana kegiatan program yang melaksanakan kegiatan sebagai anggota KPB semu. Pernyataan semu digunakan karena status sebagai anggota KPB merupakan status yang dimiliki oleh orang tuanya, sedangkan kepemilikan ternak merupakan hak yang dimilikinya.

Status dan peran yang dimiliki oleh KPMD dan TPK pada pelaksanaan program bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan aturan yang telah dibuat, namun juga memiliki fungsi sosial. Peran yang dimiliki mampu memberikan kekuasaan untuk menentukan dan merekomendasikan penerima bantuan program. Fungsi tersebut mendapatkan pengakuan yakni tidak dimusuhi di kehidupan keluarga dan tidak

dikecam di masyarakat. Dilingkungan masyarakat, bisa menjalankan sholat jumat dan bercengkrama dengan siapa saja, berbincang-bincang menikmati kopi dengan tetangga.

Keterlibatan pada struktur program juga merupakan asset keterlibatan menjadi penerima bantuan program. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui orang tua ketua TPK merupakan salah satu penerima bantuan program. Namun pasca pelaksanaan, kegiatan penggemukan sapi dilakukan oleh ketua TPK. Berdasarkan informasi di lapangan menjelaskan bahwa orang tua ketua TPK telah pindah ke pulau Enggano pasca pelaksanaan program. Peran yang dilaksanakan oleh Ketua TPK yakni perawatan dan pemeliharaan ternak. Kewajiban sebagai anggota KPB tidak dilaksanakan. Pengalihan kewajiban sebagai penerima bantuan menjadi pengalihan hak bantuan dan penguasaan penuh bantuan. Pasca pelaksanaan, bantuan program diketahui telah dijual.

Orientasi dana bantuan program merupakan hal yang kontras terlihat pasca pelaksanaan program. Tahapan-tahapan pada perencanaan dan pelaksanaan program merupakan syarat mutlak perguliran dana bantuan. Setiap anggota KPB wajib melaksanakan dan mengikuti tahapan-tahapan program berupa pelaksanaan kegiatan pertemuan rutin, menabung rutin, melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Sehingga usulan kegiatan yang diajukan oleh anggota KPB terealisasi. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi masyarakat miskin pada yakni dana pembangunan bukan pada kegiatan program. Sehingga, kegiatan wajib anggota KPB berupa pertemuan rutin, menabung rutin, iuran wajib mingguan, kegiatan piket bagi anggota KPB jenis kegiatan kelompok, pembayaran angsuran bulanan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat tidak terlaksana.

b. Tindakan KPB

Dana yang didapatkan dari usulan rencana kegiatan justru digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti pembayaran hutang, pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat sederhana dan seadanya tanpa ada upaya peningkatan kualitas usaha untuk keberlanjutan program. Sederhananya kegiatan merupakan cerminan usaha yang dianggap sampingan oleh masyarakat. Kepemilikan penuh merupakan pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan. Penguasaan secara penuh pada dana bantuan sehingga masyarakat merasa bebas menggunakan dana. Pemahaman

kepemilikan penuh juga terjadi pada infrastruktur kandang sapi yang dibangun sehingga masyarakat tidak menggunakan kandang sapi sebagai pusat pemeliharaan ternak. Penggunaan dana diluar rencana usaha ditemukan pada penelitian yakni sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota dan pembelian singso yang bukan usulan kegiatan sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Pasca pelaksanaan kegiatan ditemukan penjualan sapi yang dilakukan oleh anggota KPB. Penjualan dilakukan oleh seluruh anggota KPB Meniti Harapan 1, dan KPB Sumber Harapan 2, penjualan juga dilakukan oleh 3 orang anggota KPB Meniti harapan 2 dan 1 orang KPB Sumber Harapan 2. Pada penelitian ditemukan beberapa ekor sapi yang ada dikandang infrastruktur. Anggota KPB tidak menjual hewan ternak karena beberapa alasan yakni karena hewan ternak yang dipelihara sedang mengandung sehingga nantinya anak dari sapi diharapkan mampu menambah total dana yang akan diterima, permasalahan harga yang dirasa belum sesuai. Peran suami didalam keluarga berpengaruh terhadap penentuan penjualan hewan ternak karena pada dasarnya masyarakat desa menganut sistem patriarki dalam kehidupan bermasyarakat.

Infrastruktur penunjang ekonomi yang dibangun pada pelaksanaan kegiatan program tidak digunakan sebagai pusat kegiatan penggemukan sapi yang diajukan. Perlengkapan fasilitas kandang yang ada tidak disertai dengan pemanfaatan secara maksimal oleh anggota KPB dan pemeliharaan kandang. Pemberian minum dan memandian ternak di sungai yang berada di Desa Rena Panjang. Lampu penerang yang ada di kandang yang tidak berfungsi namun tidak diganti serta mesin air yang tetap berada didalam rumah tanpa dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan hewan ternak bantuan program. Pemanfaatan mesin air tidak maksimal dipengaruhi oleh biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap hari oleh anggota KPB. Biaya operasional dirasa sebagai beban baru yang harus ditanggung oleh KPB ditengah kondisi perekonomian keluarga.

Pembuatan kandang pribadi dilakukan anggota KPB karena pemeliharaan dan perawatan mudah dilakukan dan tanpa terikat jadwal yang dibuat. Anggota tidak terikat oleh piket yang mengatur tentang pemeliharaan ternak secara mandiri. Anggota KPB memilih menggunakan pekarangan belakang rumah untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan hewan ternak. Pemeliharaan dilakukan oleh anggota keluarga berdasarkan pengalaman yang didapat dari cerita-cerita dan sedikit pengetahuan yang

diperoleh dari kegiatan sosialisasi program. Kondisi kandang ternak terlihat sederhana hanya sebuah gubuk dengan tanah sebagai lantai dan sebuah kotak yang terbuat dari bambu sebagai tempat pemberian makan sapi. Limbah dari sapi dibuang disebuah lubang yang digali atau dibuang tanpa adanya tempat penampungan.

Selain tidak dimanfaatkannya kandang, tidak dijalannya pemeliharaan kandang, perlengkapan kandang yang seharusnya dimanfaatkan oleh anggota KPB justru dijual oleh anggota keluarga dari anggota KPB. Tindakan dilakukan oleh anggota karena munculnya anggapan adanya orang yang akan menguasai kandang secara penuh. Penguasa penuh kandang yakni pemilik lahan pembangunan kandang yang termasuk sebagai salah satu anggota KPB. Anggota secara bersama-sama melakukan pembongkaran fasilitas kandang dan melakukan penjualan fasilitas. Pembongkaran dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh beberapa anggota KPB dalam satu kelompok tanpa melibatkan kelompok secara menyeluruh.

c. Perlawanan Pasca Pelaksanaan

Perlawanan sehari-hari (*everyday forms resistance*) yakni bentuk perlawanan dalam bentuk pembangkangan dibelakang pentas dalam bentuk pencurian, penipuan, pura-pura patuh, pembicaraan tanpa landasan, sabotase (Scott, 2000:40). Selanjutnya, Scott menjelaskan bahwa perlawanan yang dilakukan kaum tani yakni perlawanan tanpa membutuhkan adanya koordinasi atau perencanaan, sering merupakan sebetulnya kerja sama pribadi dan secara cerdas menghindari konfrontasi langsung pada pihak yang berkuasa. Perlawanan sehari-hari dilakukan dengan tindakan-tindakan kecil atau tindakan yang biasa-biasa saja namun dilakukan secara terus menerus. perlawanan sehari-hari dalam bentuk tindakan tanpa koordinasi yang berfungsi untuk menyelamatkan diri sendiri merupakan perlawanan bersifat *brechtian* dan merupakan bentuk perlawanan yang tidak bisa dianggap sepele.

Unsur pemenuhan mendesak merupakan hal yang menyebabkan tindakan-tindakan perlawanan dilakukan sehingga dapat menghambat suatu kegiatan. Perlawanan yang dilakukan merupakan perlawanan yang kuat justru karena kelembagaan yang tidak kelihatan dan kekuatan berasal dari anonimitas mereka. Menarik perhatian pada setiap tindakan bukan merupakan ciri khas dari tindakan perlawanan sehari-hari karena justru akan membahayakan diri sendiri. Resiko

perlawanan memiliki tingkat resiko yang rendah atau berkurang apabila seluruh masyarakat terlibat didalamnya (Scott, 2000;48).

Penilaian “kurang sesuai” terhadap ternak yang coba dibandingkan oleh Kades dengan perbandingan “garasi dan mobil” merupakan perumpamaan untuk menjelaskan penilaian subjektif terhadap kegiatan yang dilakukan anggota KPB. Sapi bali menurut kades tidak sesuai diadakan dengan kualitas kandang yang cukup mahal. Perumpamaan sapi sebagai mobil dan garasi sebagai kandang yang telah dibangun pada pelaksanaan program menjadi perumpamaan ampuh untuk menjelaskan bahwa adanya tindakan yang salah dari anggota KPB. Sejumlah dana yang digulirkan kepada anggota KPB digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehingga sapi yang dibeli yakni sapi bali.

Pemahaman tentang “seharusnya saya” diperkuat dengan obrolan-obrolan ngopi santai yang dilakukan Kepala Desa ketika berkunjung atau dikunjungi oleh warga yang bukan sebagai anggota KPB. Ketika obrolan mulai mengarah ke program PKKPM, sang kades akan memberikan perbandingan subjektif tentang penerima bantuan yang seharusnya dan yang terjadi. Keadaan keluarga miskin didusun 3 dan 4 (yang mayoritasarganya tidak menjadi anggota KPB) digambarkan dengan kondisi rumah sederhana yakni lantai tanah, dinding papan serta atap bocor.

Obrolan tanpa landasan yang lontarkan kepada KPMD desa Rena Panjang menjelaskan bahwa terdapat pemahaman bersama tentang status yang diperoleh KPMD dan anggota KPB akan memberikan *power* yang membuatnya mampu melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. KPMD merupakan simbol individu yang memiliki power yang digambarkan oleh anggota KPB dalam konteks pengambilan keputusan tentang pelaksanaan program PKKPM di Desa Rena Panjang. Umpatan-Umpatan selalu dilakukan dibelakang pentas dan dilakukan atas dasar sikap tahu sama tahu. Hubungan kekeluargaan dan hubungan antar anggota masyarakat tidak terganggu secara nyata. Pada level pemahaman yang dicerminkan dalam bentuk pembicaraan dibelakang pentas sehingga hubungan tetap terjalin. Pada kegiatan kebersihan desa, pada kegiatan pernikahan di dusun III, bapak-bapak tetap menjalankan tugasnya dan ibu-ibu berada di dapur untuk berkumpul membuat sajian dengan nyaman tanpa ada yang dikucilkan.

Kegiatan-kegiatan wajib anggota tidak dilaksanakan oleh anggota KPB. Piket wajib yang dibagi setiap hari untuk membersihkan kandang, pencarian rumput pakan ternak tidak dikerjakan oleh anggota KPB. Pertemuan-pertemuan rutin tidak dilaksanakan dan iuran wajib mingguan tidak dilaksanakan oleh anggota KPB.

d. Efek Liar PKKPM

Efek liar merupakan dampak yang tidak terduga dari suatu kegiatan diluar perencanaan penelitian. Hasil penelitian pasca pelaksanaan program PKKPM-P2B di Desa Rena Panjang menunjukkan beberapa dampak yakni orientasi masyarakat terhadap bantuan dana yang digulirkan, miskin merupakan aset yang menjadi modal masyarakat mendapatkan bantuan dana, serta menunjukkan *mindsheet* bantuan program pembangunan merupakan hibah dari pemerintah yang terbentuk telah disetujui pada level pemaknaan masyarakat desa khususnya Desa Rena Panjang.

Pendekatan *bottom-up* yang diterapkan dengan menitikberatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan akan berdampak sebaliknya dari tujuan program. Karakteristik masyarakat peladang masyarakat desa Rena Panjang memiliki ciri terhadap pola kegiatan ekonomi masyarakat desa. Program pembangunan yang bersifat guyub dan pelaksanaan yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama memiliki efek negatif pada pelaksanaan kegiatan ekonomi yang diusulkan. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan pada program PKKPM bertumpu pada kegiatan berkelompok yang dilaksanakan oleh empat kelompok. Namun pasca pelaksanaan kegiatan ekonomi usulan anggota KPB tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Menurut Peredam perlawanan sosial merupakan cara-cara dengan merujuk pada kearifan lokal merupakan modal sosial berupa tradisi, agama dan kebiasaan daerah mampu digunakan sebagai alternatif (Bagus. 2013:7). Bentuk peredam berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat guyub sehingga perlawanan yang dilakukan bisa memudar. Namun tradisi-tradisi peredam yang mampu meningkatkan solidaritas antar anggota tidak ditemukan pada saat penelitian sehingga perlawanan terus berkejang dari tindakan sembunyi-sembunyi hingga tindakan terang-terangan. Dampak dari tidak adanya peredam perlawanan anggota yakni kegiatan program tidak berjalan sesuai dengan rencana pembangunan.

Efek liar dari program pembangunan di desa Rena Panjang yakni mampu melemahkan struktur sosial yang ada di masyarakat. Tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan mampu melemahkan struktur karena mampu menghilangkan fungsi struktur sosial yang ada dalam konteks pelaksanaan kegiatan program. Anggota KPB yang berpura-pura mengikuti perintah ketua KPB namun tidak menjalankan, Ketua UPK tidak melaksanakan fungsi kontrol terhadap anggota KPB sehingga munculnya nihil pembayaran dari anggota. Kelompok semu merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan pemikiran tentang kegiatan ekonomi program PKKPM dan bersifat mutlak. Obrolan merupakan media yang digunakan sebagai alat penyamaan pemikiran antar anggota KPB atau anggota keluarga KPB. Penyamaan pemikiran terjadi karena adanya kecurigaan-kecurigaan anggota KPB atau anggota keluarga terhadap pihak tertentu baik antar anggota, anggota kepada anggota masyarakat yang menempati struktur yang dibentuk pada program pembangunan.

Anggota kelompok semu terdiri dari anggota masyarakat bukan penerima bantuan program dan anggota masyarakat penerima bantuan program. Pemahaman yang terbentuk antara dua kelompok yang berbeda terletak pada pemaknaan terhadap bantuan program pembangunan. Masyarakat bukan penerima bantuan program memiliki kesamaan pemikiran tentang penerima bantuan program dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh penerima bantuan, sedangkan kesamaan pemikiran yang terbentuk oleh penerima bantuan program yakni berupa kecurigaan-kecurigaan yang ditujukan kepada salah satu anggota masyarakat yang menempati posisi dengan kekuasaan lebih dari KPB yakni Fasilitator program dan KPMD. Keberadaan kelompok semu tidak bersifat kekal namun sering kali muncul ketika pembahasan berupa obrolan ketika sedang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan pemikiran dan memberikan peluang untuk melakukan tindakan yang membahayakan keberlangsungan program pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi Pasca Pelaksanaan Program PKKPM yang membahas mengenai tindakan masyarakat Desa Rena Panjang, terkhusus anggota KPB terhadap pelaksanaan kegiatan program PKKPM, diketahui bahwa tentang orientasi masyarakat terhadap program, pemaknaan terhadap program PKKPM

dan adanya perlawanan yang bersifat *brechtian* atau perlawanan sehari-hari (*everyday forms resistance*).

Adanya pemahaman tentang penerima bantuan program merupakan cerminan bahwa miskin merupakan aset bagi masyarakat sehingga masyarakat ingin menjadi penerima bantuan program dengantujuan mendapatkan bantuan program. Efek liar yang ditemukan diluar perencanaan penelitian yakni adanya pelemahan struktur sosial yang dibentuk pada program PKKPM dan adanya pengelompokan-pengelompokan semu masyarakat. Pengelompokan semu berkaitan dengan kesamaan pemikiran dan pemaknaan program pembangunan dan mengakibatkan munculnya pihak yang saling tidak menyukai satu sama lain dalam konteks pelaksanaan kegiatan ekonomi program.

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian, yakni penyesuaian jenis program pembangunan kepada masyarakat yang berdasarkan pendekatan kultural masyarakat, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis guna menghindari gagalnya program pemberdayaan, penguatan fungsi *controlling* terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan hal penting pada pelaksanaan kegiatan program baik pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan serta dibangunnya sistem pengawasan di tingkat desa sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachdim, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: Rosda.
- Bagus, A.G. Ani Putra. 2013 “Peran Kearifan Lokal Dalam Resolusi Konflik Keyakinan Beragama di Jawa Timur”. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26(1): 1-14.
- Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. “Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. 1-60.
- Scoot, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.